



## MUSEUM BAWAH AIR M. V. BOELONGAN: SEBUAH GAGASAN PEMBAHARUAN MUSEUM

### *M. V. Boelongan Underwater Museum: A Concept of Museum Renewal*

Dwi Kurnia Sandy<sup>1a</sup>, Salma Fitri Kusumastuti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosiohumaniora, No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia

<sup>a</sup> dksandy22@gmail.com

Naskah diterima: 20/03/2019; direvisi: 04/04-23/05/2019; disetujui: 10/06/2019

Publikasi ejurnal: 30/06/2019

#### **Abstract**

*Museum is not only a place for storing various artifacts, but also as a media of learning. However, the current management of museums in Indonesia is still not serving visitors well. Museum is not only located on the land, but there are also underwater museums. The plan of build an underwater museum has been discussed by museum practitioners and academics. Many locations and objects that could be used as underwater museums in Indonesia, one of that is the M.V. Boelongan Shipwreck. This ship was sunk by Japanese Army during the Second World War. Nowadays, M.V. Boelongan has been an attractive destination for tourism activities, such as diving. To make it more benefit, not only in economic, but also in education and preservation, build and design this shipwreck as museum is one of the best solution. It could give the chance to everyone to see the shipwreck without diving. This museum should be plan to have a modern design, easier to educate and entertain the visitors, and also to preserve it as a heritage. M.V. Boelongan is a part of Indonesian maritime history, the important values should be preserved and published to the public.*

**Keyword:** *underwater museum, shipwreck, M.V. Boelangan, preservation.*

#### **Abstrak**

Selain menjadi tempat penyimpanan berbagai artefak, museum juga menjadi media pembelajaran. Namun, saat ini pengelolaan museum di Indonesia masih kurang melayani pengunjung. Museum terdapat di darat dan di perairan. Isu pembuatan museum bawah air sudah menjadi pembahasan di kalangan pecinta museum. Banyak lokasi dan objek dapat dijadikan museum bawah air di Indonesia, salah satunya adalah Kapal M.V. Boelongan. Keberadaan M.V. Boelongan menjadi sebuah daya tarik pariwisata, diantaranya wisata selam. Pembuatan museum bawah air adalah salah satu alternatif yang dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, pendidikan dan pelestarian. Museum Bawah Air M.V. Boelongan memungkinkan pengunjung yang tidak dapat menyelam tetap dapat menyaksikan keberadaan M.V. Boelongan di bawah air. Museum akan dirancang sesuai dengan perkembangan zaman, baik dari sisi pengelolaan maupun perancangan. Hal ini sejalan dengan paradigma museum yang sejak lama digadang-gadang, yaitu membuat museum yang mengedukasi sekaligus memberikan hiburan bagi pengunjungnya. Selain itu, dengan adanya museum dapat melindungi keberadaan bangkai kapal dan menjadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian M.V. Boelongan. M.V. Boelongan adalah bagian dari sejarah kemaritiman di Indonesia. Tinggalan budaya materi ini patut dilestarikan dan disampaikan nilai-nilainya

**Kata Kunci:** Museum bawah air, kapal karam, M. V. Boelangan, pelestarian.

#### **PENDAHULUAN**

Kepulauan Indonesia berada di persimpangan jalur perdagangan dunia. Sejak dahulu, di wilayah ini sudah berdiri kerajaan-kerajaan yang tidak hanya

menguasai daratan namun juga mampu menaklukkan lautan. Lautan memiliki peranan besar bagi kemajuan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Tidak berhenti pada masa kerajaan Hindu-Buddha maupun

Islam, pada masa kolonial pun eksistensi lautan Indonesia masih terus berlanjut. Sebagai bukti adanya kontak budaya di lautan, tinggalan arkeologi bawah air berupa kapal karam menjadi tinggalan yang penting. Dalam perkembangannya, peneliti di Indonesia sering menggunakan kata *shipwreck* untuk melakukan kajian atau penelitian-penelitian pada kapal karam.

Persebaran kapal karam di wilayah perairan Indonesia biasanya mengikuti jalur pelayaran khusus yang lebih dikenal dengan *The Spice and Silk Routes* (jalur rempah dan sutera). Pada jalur ini banyak ditemukan kapal dari abad pertengahan yang diperkirakan karam ketika akan melakukan kontak perdagangan dengan masyarakat lokal. Namun, pola tersebut mulai berubah ketika terjadi perang dunia dan mengakibatkan banyaknya temuan kapal karam yang lebih modern (terbuat dari logam) pada jalur yang bukan perlintasan *The Spice and Silk Routes*. Salah satu jalur yang bukan termasuk *The Spice and Silk Routes* adalah pantai barat Sumatera. Pada jalur ini ditemukan *shipwreck* M.V. Boelongan Nederland.

M. V. Boelongan Nederland adalah bangkai kapal Belanda yang tenggelam di Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Januari 1942 akibat bombardir oleh tentara

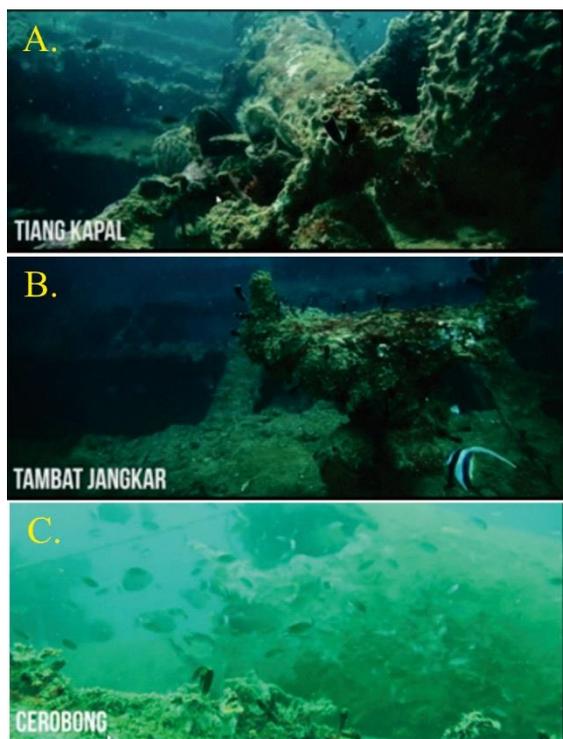
Jepang saat Perang Dunia ke-2 (Ridwan, Kusumah, Husrin, & Kepel, 2015, p. 90). Kapal berjenis kargo ini adalah milik perusahaan pelayaran Belanda, *Koninklijke Pakeetvaart Maatschappij* (KPM). Kapal tersebut dibuat pada tahun 1915 oleh perusahaan Gebroeders Pot N.V, sementara bagian mesin dibuat oleh perusahaan Werkspoor N.V. Dimensi asli kapal yaitu 72,6 m x 11,63 m x 3,7 m ([gambar 1](#)).

Pada awal tahun 1942 pada saat meletusnya Perang Dunia II, kapal kargo ini digunakan tentara Hindia-Belanda untuk melarikan diri dari serangan tentara Jepang yang mulai menguasai kawasan barat Pulau Sumatera. Namun, pelarian tersebut diketahui oleh pihak Jepang. Karenanya, tentara Jepang menjatuhkan bom dari pesawat udara dan menyebabkan kapal karam. Kapal MV. Boelongan Nederland kembali ditemukan pada tahun 1993 oleh Samsuardi, Penyelam dari Yayasan Minang Bahari ([gambar 2](#)).

Dalam naskah UNESCO *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 Pasal 1 disebutkan bahwa *Underwater Cultural Heritage* (cagar budaya bawah air) adalah tinggalan yang menjadi bukti keberadaan manusia yang memiliki kaitan dengan kebudayaan, kesejarahan, dan kearkeologian yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam air



**Gambar 1.** Kapal M. V. Boelongan Nederland tahun 1915 (**Sumber:** wrecksite.com)



**Gambar 2.** Kondisi Kapal Karam saat ini (Sumber: Tim PKM PSH UGM Boelongan, 2016).

pada waktu tertentu atau secara terus-menerus selama sekurang-kurangnya 100 tahun. Pada Ayat (ii) disebutkan bahwa tinggalan yang dimaksud dapat berupa kapal, pesawat, kendaraan lain atau bagian dari kargo beserta konteks arkeologi dan konteks alam (UNESCO, 2001). Hingga tulisan ini dibuat, Pemerintah Indonesia masih dalam upaya penyusunan naskah untuk meratifikasi konsensus UNESCO tersebut.

M.V. Boelongan merupakan kapal karam yang memiliki potensi diantaranya dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga keberadaannya. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, Pasal 1 Ayat (12), yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pembuatan museum di lokasi penemuan M. V. Boelongan dinilai cocok untuk mempertahankan keberadaan kapal sekaligus menyampaikan berbagai nilai dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Mengapa museum? Karena museum dapat memberikan sarana kepada masyarakat dengan berbagai latar belakang dan kemampuan untuk menikmati dan mempelajari sebuah cagar budaya.

Dalam paradigma *New Museology*, museum yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah museum yang memperhatikan aspek partisipasi dan juga perkembangan teknologi. Selain itu, pengelolaan museum yang tepat (*appropriate museology*) juga harus memperhatikan kelestarian dari warisan budaya dan keadaan sosio-ekonomi masyarakat sekitar (Kreps, 2011, p. 26). Museum ini nantinya akan digagas sebagai Museum Bawah Air M.V. Boelongan yang akan dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan perkembangan paradigma museum dan menjadi museum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, setiap cagar budaya ataupun yang belum ditetapkan menjadi cagar budaya namun sudah memenuhi syarat menjadi cagar budaya harus dilakukan pengelolaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (21) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menerangkan bahwasanya pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Walaupun belum ditetapkan menjadi cagar budaya, benda yang sudah memenuhi aspek untuk menjadi cagar budaya, memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama dengan cagar budaya. Persebaran cagar budaya dan non cagar budaya tidak hanya berfokus pada

yang berada di daratan, namun juga termasuk tinggalan yang ada di perairan. Tinggalan benda di perairan yang memiliki syarat untuk menjadi cagar budaya biasanya disebut dengan istilah sumber daya arkeologi bawah air.

Meskipun sudah terdapat aturan mengenai perlindungan cagar budaya, faktanya banyak terjadi kerusakan pada sumber daya arkeologi bawah air berupa *shipwreck*. Beberapa kasus pengelolaan tinggalan bawah air kapal karam telah dieksploitasi secara berlebihan oleh penyelam dan pencari harta karun. Dari berbagai tinggalan tersebut, hanya terdapat beberapa yang masih belum dieksploitasi secara berlebihan dan sebagian ini yang harus dikelola dengan benar (Green, 2004, p. 369). Masalah eksploitasi muncul akibat perbedaan tafsir antar berbagai lembaga.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memiliki pandangan lain terkait sumber daya arkeologi bawah air, mereka menyebutnya dengan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT). Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.56/DJ-PSDKP/2011, BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun. Aturan ini mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi fokus adalah muatan kapalnya. Padahal kapal karam memiliki arti bagi perkembangan bangsa yang juga harus dikelola. Pengelolaan ini akan memberikan kesadaran pada masyarakat dan segala pihak atas nilai situs dan pada akhirnya memiliki kesadaran bersama dalam merawat (Adhityatama, 2012, p. 41). Selain itu, pengelolaan harus menghasilkan sebuah sistem yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara sumber daya

arkeologi bawah air untuk masa depan, untuk membuat perencanaan yang dapat menjamin perlindungan terhadap situs dalam jangka panjang.

Saat ini terdapat dua kapal yang sangat masif dimanfaatkan dan dikelola sebagai destinasi wisata dan edukasi yaitu, kapal US Liberty Tulamben, Bali dan Indonor Karimunjawa, Jepara. Berbagai penelitian dan gagasan sudah banyak dilakukan. Diantaranya adalah gagasan mengenai jalur penyelaman yang aman dan edukatif di sekitar *shipwreck* US Liberty (Adhityatama, 2012, p. 81). Sebenarnya, kapal MV. Boelongan memiliki potensi yang sama besarnya untuk dikelola.

Saat ini kapal M.V. Boelongan tercatat sebagai cagar budaya oleh BPCB Batu Sangkar dengan nomor inventaris No. 14/BCB-TB/A/14/2007 (Ridwan et al., 2015, p. 85). Meskipun sampai saat tulisan ini dibuat Surat Keputusan penetapan benda cagar budaya dari kapal M.V. Boelongan masih belum ada, kapal karam ini tetap harus mendapat perlakuan sama dalam pengelolaan. Hal ini karena kapal karam MV. Boelongan memiliki nilai penting salah satunya dalam perang dunia II (Prasetya, 2018, p. 6). Berangkat dari pemikiran bahwa semua sumber daya arkeologi harus dapat dinikmati semua kalangan, maka pembuatan museum bawah air menjadi sebuah gagasan yang diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Sebelum masuk ke pembahasan inti terkait museum bawah air, harus diketahui lebih dahulu bagaimana perkembangan museum dari masa ke masa. Hal ini penting sebagai landasan kenapa gagasan museum bawah air M.V. Boelongan muncul. Museum untuk masyarakat mulai dirintis pada abad pencerahan di Eropa. The Ashmolean Museum yang didirikan pada tahun 1683 oleh Universitas Oxford, Inggris adalah museum pertama yang dibuka dan ditujukan untuk umum. Koleksi yang dipamerkan adalah bermacam-macam benda

dari seluruh dunia yang dibawa oleh para pedagang. Sebelum dipamerkan di museum, benda-benda ini hanya ditampilkan di rumah mereka di London. Selanjutnya, pada tahun 1759 di London pemerintah menginisiasi berdirinya The British Museum. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Prancis pada tahun 1793 dengan mendirikan The Louvre (Lewis, 2010, p. 2). Pada masa selanjutnya di Asia, museum didirikan oleh perkumpulan masyarakat yang juga terdiri dari orang-orang Eropa. Pada tahun 1778 di Jakarta, Perkumpulan Masyarakat Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan mendirikan museum yang merupakan cikal-bakal dari Museum Nasional Indonesia saat ini. Begitu juga di India pada tahun 1784, masyarakat Asia Bengal mendirikan museum yang menjadi awal dari Museum India di Kalkuta (Lewis, 2010, p. 3).

*International Council of Museum* (ICOM) mendefinisikan museum sebagai lembaga permanen non-profit dan didirikan untuk kepentingan serta kemajuan masyarakat. Museum mengumpulkan, mengonservasi, meneliti, menyampaikan, dan memamerkan warisan bendawi maupun non-bendawi milik manusia dan lingkungannya untuk tujuan edukasi/pembelajaran dan hiburan (ICOM, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (1) museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (3) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya, dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Maka dari itu, sejalan dengan definisi museum menurut ICOM maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, suatu museum hendaknya dapat menyampaikan informasi mengenai koleksi yang dimilikinya kepada masyarakat luas. Museum harus menjadi tempat mendidik dengan memasukkan unsur-unsur menghibur secara seimbang, sehingga dapat menjadi wahana pendidikan yang memiliki nuansa berbeda dengan tempat pendidikan formal biasa. Selama ini museum hanya dipandang sebagai tempat penyimpanan barang-barang tua sehingga minat masyarakat untuk mengunjungi museum menjadi minim. Sebaliknya, gairah pemerintah untuk mendirikan museum di daerah-daerah cenderung meningkat. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan oleh dunia permuseuman di Indonesia untuk bangkit dengan melakukan “penataan kembali”, baik dari sisi perancangan museum maupun kerangka pikir dan cara pandang terhadap museum (Tanudirjo, 2007, pp. 15–17).

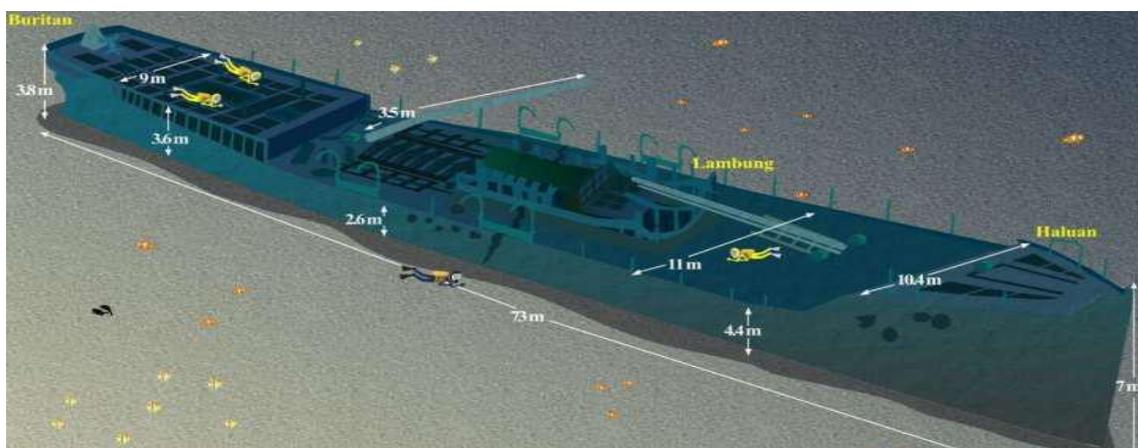
Berkaitan dengan “penataan kembali” kerangka pikir dan cara pandang terhadap museum, sebenarnya gerakan pembaharuan terhadap museum atau revolusi museum sudah terjadi beberapa kali. Revolusi museum pertama berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan ditandai dengan perubahan pada pendekatan museum yang tadinya multidisiplin menjadi interdisiplin. Selanjutnya pada tahun 1960 muncul revolusi museum kedua dimana museologi diakui sebagai sebuah disiplin ilmu dan mulai diajarkan di perguruan tinggi (Mensch, 1992, pp. 4–5). Perkembangan ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 1970-an lahir sebuah pemikiran yang disebut dengan *New Museology*. Pada era 2000-an, revolusi museum ketiga terjadi dan masih kita saksikan hingga saat ini. Revolusi museum ketiga menyoroti hal yang terkait dengan

partisipasi di museum (Mensch & Mensch, 2011, p. 13). Adanya berbagai perkembangan dalam dunia permuseuman ini tentu memiliki kaitan dengan keadaan sosial-ekonomi dan politik pada masing-masing masa (Sandell, 1998, pp. 401–402). Perlu diingat pula bahwa berbagai perkembangan ini pada awalnya dilahirkan di negeri-negeri barat seperti Eropa dan Amerika. Namun, bukan tidak mungkin jika berbagai teori pembaharuan yang telah disampaikan tersebut diterapkan di Indonesia. Salah satu pembaharuan tersebut adalah gagasan mengenai partisipasi di museum. Gagasan partisipasi di museum muncul sebagai respon atas museum “lama” yang selama ini lebih berfokus pada aspek-aspek teknis dan metodologis museum, menerapkan pembatasan dari atas ke bawah (*top-down limitation*), tidak mengedepankan aspek sosial museum dan kurang memperhatikan aspek-aspek lokal di masyarakat (Kreps, 2011, p. 28).

Adanya berbagai perkembangan dalam dunia permuseuman ini tentu memiliki kaitan dengan keadaan sosial-ekonomi dan politik pada masing-masing masa (Sandell, 1998, pp. 401–402). Perlu diingat pula bahwa berbagai perkembangan ini pada awalnya dilahirkan di negeri-negeri barat seperti Eropa dan Amerika. Namun, bukan tidak mungkin jika berbagai teori

pembaharuan yang telah disampaikan tersebut diterapkan di Indonesia. Salah satu pembaharuan tersebut adalah gagasan mengenai partisipasi di museum. Gagasan partisipasi di museum muncul sebagai respon atas museum “lama” yang selama ini lebih berfokus pada aspek-aspek teknis dan metodologis museum, menerapkan pembatasan dari atas ke bawah (*top-down limitation*), tidak mengedepankan aspek sosial museum dan kurang memperhatikan aspek-aspek lokal di masyarakat (Kreps, 2011, p. 28).

Banyak kasus di Indonesia dimana museum masih berfokus pada koleksi. Seperti yang terjadi di Museum Trowulan, dimana pihak museum dinilai belum berperan optimal dalam memediasi masyarakat dengan pemerhati budaya. Di daerah Trowulan sangat terlihat banyak kepentingan, misalnya antara masyarakat yang memanfaatkan tanah liat dan temuan batu bata Trowulan untuk kebutuhan hidupnya dengan pelestari budaya yang tidak memperbolehkan adanya pemanfaatan batu bata Trowulan supaya Situs Trowulan dapat terjaga (Winaya, 2015, pp. 98–99). Padahal seharusnya sebagai lembaga pendidikan dan sosial, museum harus mulai bergerak ke arah *New Museology* agar dapat berperan aktif sebagai mediator dalam permasalahan ini.



**Gambar 3.** Rekonstruksi 3D Shipwreck Boelongan (Sumber: Tim PKM PSH UGM Boelongan, 2016).

Masalah di atas dipecahkan dengan sebuah konsep museum baru yang bernama *Open Air Museum*, yaitu sebuah lapangan terbuka yang di dalamnya terdapat koleksi bangunan bersejarah lengkap dengan kegiatan sesuai dengan karakteristik dan sosial di sekitarnya serta dilindungi secara terintegrasi (Wahyudi & Kuswanto, 2014, p. 68). Konsep yang ditawarkan oleh Wahyudi dan Kuswanto (2014) adalah salah satu gerakan pembaharuan museum yang melibatkan masyarakat Trowulan, pelestari budaya serta pengunjung dalam pelestarian warisan budaya. Masyarakat akan mendapatkan pekerjaan yang mampu menggantikan pekerjaan yang merusak situs. Pelestari budaya dibantu dalam melestarikan warisan budaya, sedangkan pengunjung mendapatkan pengalaman yang berbeda saat mengunjungi museum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembentukan museum bawah air M. V. Boelongan ([gambar 3](#)) merupakan salah satu bentuk gerakan pembaharuan baik dalam hal pengelolaan sumber daya arkeologi bawah air maupun permuseuman di Indonesia. Di belahan negara lain, museum bawah air telah dapat dinikmati dan ada beberapa yang masih dalam tahap perencanaan. Contohnya The Baiheliang Underwater Museum, China. Museum ini berada di punggung batu dan juga merupakan situs arkeologi di Fuling, China. Museum ini dari data UNESCO tahun 2018 menampilkan beberapa prasasti hidrologis tertua di dunia, rekaman 1.200 tahun perubahan di permukaan air sungai Yangtze di utara distrik Fuling Municipality Chongqing. Museum ini merupakan museum bawah air pertama di dunia. Selanjutnya ada The Guangdong Maritime Silk Road Museum (Nanhai No. 1 Museum), China yang menampilkan sebuah kapal karam yang mampu menampung 60.000 sampai 80.000 barang berharga terutama keramik. Selain itu konsep museum bawah air Alexandria, Mesir juga telah dipaparkan. Museum ini dari data UNESCO tahun 2018 akan menampilkan

artefak yang ditemukan di istana dari Dinasti Ptolemaic, dari situs Kota Cekung serta sisa-sisa mercusuar Alexandria.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, muncul pertanyaan yaitu, mengapa museum bawah air cocok untuk mengelola *shipwreck* M. V. Boelongan? Selain itu bentuk rancangan museum yang ditinjau dari berbagai aspek juga perlu dijelaskan dalam artikel ini. Artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu *role model* pengelolaan tinggalan bawah air terutama kapal karam. Selanjutnya diharapkan gagasan ini menjadi pemicu diskusi perihal pembaharuan museum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan sebuah gagasan atau pendahuluan (*preliminary research*) dalam memahami fenomena pengelolaan tinggalan bawah air terutama tinggalan kapal karam. Dalam penyusunannya, artikel ini menggunakan studi pustaka yakni menghimpun dan menyusun literasi terkait, terutama mengenai pengelolaan sumber daya arkeologi bawah air dan permuseuman. Setelah data terkumpul, data-data tersebut selanjutnya akan dideskripsikan secara detail dan dilakukan analisis (Tanudirjo, 1989, p. 12). Analisis-*analisis* yang telah dikumpulkan lalu disintesa sehingga memunculkan konsep atau gagasan. Konsep atau gagasan yang dimunculkan mempertimbangkan berbagai aspek yang akan diutarakan dalam artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Museum Bawah Air M. V. Boelongan.**

Di Indonesia terdapat dua badan hukum yang dapat melakukan pengelolaan museum secara mandiri. Dua badan hukum tersebut adalah yayasan untuk museum milik swasta dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk museum milik pemerintah. Adanya

paradigma baru di dunia permuseuman dunia membuat beberapa aspek dari badan hukum museum terutama museum pemerintah menjadi tidak relevan lagi. Terdapat dua permasalahan yang menimpa museum saat ini yaitu masalah pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia atau pengelola museum (Ujianto & Isharyanto, 2016, p. 93).

Museum yang berada di bawah pemerintah (UPT/UPTD), tidak hanya berperan sebagai salah satu pilihan dari destinasi wisata, namun juga digunakan sebagai penyumbang Pemasukan Asli Daerah (PAD). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, semua museum milik pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ataupun daerah, sehingga pembiayaan museum tergantung kekuatan finansial setiap daerah dan bantuan pemerintah pusat (Mustiko, 2012, p. 18). Hal ini diperparah dengan penggunaan anggaran museum yang lebih banyak dibelanjakan ke kebutuhan perawatan koleksi dan kebutuhan gedung. Kebutuhan terkait pelayanan kepada pengunjung mendapat porsi kecil dalam alokasi anggaran museum.

Setelah memperhatikan hal-hal di atas, maka pengelolaan museum bawah air M.V. Boelongan akan menggunakan sistem Badan Layanan Umum (BLU). Penggunaan sistem ini terinspirasi dari tulisan Ujianto (2016) yang mulai menggagas adanya kemandirian dalam pengelolaan keuangan museum (Ujianto & Isharyanto, 2016). Badan Layanan Umum (BLU), adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keinginan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (UU No. 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1). Penggunaan BLU untuk pengelolaan museum ini didasarkan pada konstitusi Indonesia yaitu,

setiap hal yang menyangkut hak hidup orang banyak maka diambil alih negara. Jika museum diserahkan kepada swasta maka orientasinya akan mencari keuntungan. Padahal jelas, museum merupakan sebuah lembaga pendidikan yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan.

Salah satu keuntungan menjadi BLU adalah adanya otonomi pengelolaan keuangan dan otonomi atas kelembagaan dengan tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Dalam BLU dikenal istilah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Berdasarkan UU No 23 Tahun 2005, PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat. PPK-BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun menerapkan praktik bisnis, namun uang hasil bisnis tersebut diputar dalam tubuh museum, karena pada dasarnya yang dilarang itu adalah mencari keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok. Jika mencari keuntungan untuk kebutuhan museum maka hal tersebut tidaklah salah untuk dilakukan.

Museum pemerintah yang ingin memiliki badan hukum berupa BLU, harus memenuhi tiga persyaratan yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif (Ujianto & Isharyanto, 2016). Secara substantif museum sudah memenuhi syarat untuk menjadi BLU, karena syarat substantif akan terpenuhi bila lembaga tersebut bergerak dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam UU No. 66 Tahun 2015 yang menerangkan bahwa museum sebagai lembaga yang melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengkomunikasikan koleksi kepada masyarakat dan mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan

guna melayani masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Persetujuan dari sisi teknis didapat apabila pejabat terkait setuju untuk berubah menjadi BLU (Ujiyanto & Isharyanto, 2016).

Pemenuhan syarat dari segi administratif, museum harus merancang strategi bisnis jangka lima tahun yang mengacu kepada rencana strategis lembaga terkait (Ujiyanto & Isharyanto, 2016, p. 99). Museum perlu membenahi berbagai fasilitas yang mereka miliki guna meningkatkan ketertarikan masyarakat berkunjung ke museum. Selain fasilitas, museum perlu untuk merancang strategi dan program pemasaran yang efektif dan saling terintegrasi (Wibowo, 2015, p. 37). Museum harus diberikan kebebasan dalam melakukan penyusunan, karena museum lebih mengetahui kemampuan dan kebutuhannya sendiri. Penyusunan yang mandiri berdampak pada perencanaan promosi museum yang lebih disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Pemahaman akan kebutuhan pengelolaan bagi setiap objek wisata seperti museum masih sering dijumpai. Hal ini dikarenakan beberapa pihak masih terpatok pada pengertian museum sebagai lembaga *non-profit* (Satyawati, 2016, p. 15).

Kriteria lain yang mencirikan museum pasca modern adalah museum berkembang menjadi sebuah pusat kegiatan sosial budaya, meskipun fungsi utama museum tetap sebagai tempat menyimpan dan melestarikan warisan budaya (Yulianti, 2011, p. 14). Hal ini dapat tercapai jika pengelola museum lebih berfokus pada pelayanan pengunjung. Namun masalahnya, museum selalu terkendala keuangan dan sumber daya saat akan melakukan pelayanan maksimal pada pengunjung. Sebagai lembaga yang memberikan jasa kepada masyarakat, museum dapat mengambil atau memungut imbalan sebagai balasan jasa yang mereka berikan. Secara garis besar,

museum diperbolehkan mencari keuntungan dari layanannya selama keuntungan tersebut hanya diperuntukan untuk perbaikan layanan museum. Jasa yang dimaksud berupa pelayanan dan hiburan saat berkunjung.

Perlu diperhatikan, pengelolaan keuangan museum pemerintah di Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk memutar uangnya sebagai modal membuka usaha, karena museum tidak memiliki otonomi keuangan. Segala pendapatan yang didapatkan museum tidak dikembalikan ke museum melainkan dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mustiko, 2012, p. 3). Pungutan yang diperoleh dari pengunjung tidak dapat digunakan langsung oleh museum. Oleh sebab itu penggunaan sistem BLU memungkinkan pungutan dikelola langsung oleh museum.

Biaya pungutan kepada pengunjung harus menyesuaikan dengan pedoman yang ada di setiap aturan tingkatan administrasi museum berada. Imbalan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disesuaikan dengan hasil investasi dana. Tarif juga harus memperhatikan keberlanjutan, kelembagaan layanan, persaingan bisnis dan rasa keadilan (Ujiyanto & Isharyanto, 2016, p. 99). Museum BLU dapat membuat usaha mereka secara mandiri. Sebagai implementasinya kepada museum M.V. Boelongan, pengelola dapat membuka beberapa peluang usaha.

Posisinya di dalam wilayah pengembangan wisata Kabupaten Pesisir Selatan memungkinkan untuk menarik banyak pengunjung. Pengunjung dapat melihat pemandangan dari atas museum. Rumah-rumah di sekitar museum dimanfaatkan sebagai tempat penginapan bagi pengunjung. Jika terdapat pengunjung yang ingin menyelam, museum dapat membuka usaha jasa peminjaman peralatan selam beserta pendamping penyelaman. Semua potensi tersebut akan memberikan pemasukan yang besar jika dikelola dengan baik. Sebagai contoh, Museum Benteng

Vredeborg di Yogyakarta membuka kafe kopi di sisi utara museum sebagai sebuah upaya tambahan pemasukan. Selain kafe, bagian bangunan diorama empat juga dimanfaatkan sebagai tempat berbagai acara seminar diskusi dan sarasehan (Prasetya, 2012, p. 118).

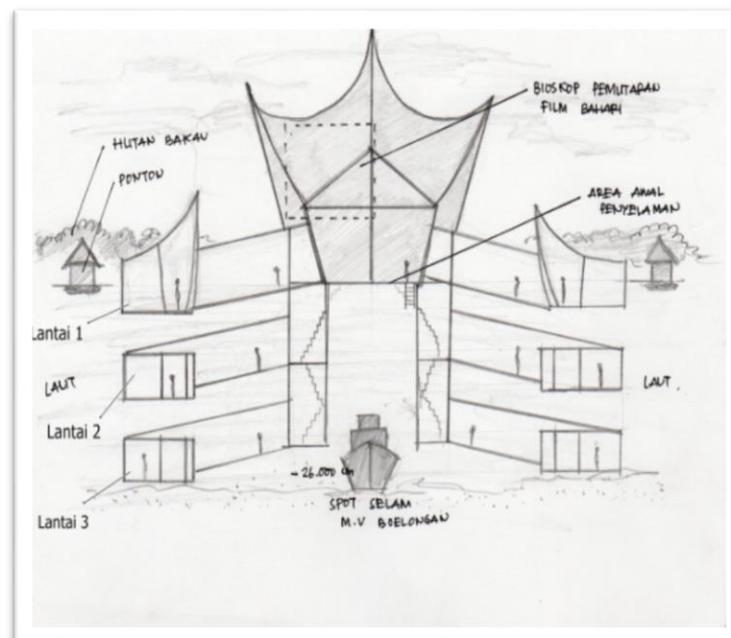
Dengan haknya mengurus keuangan sendiri, Museum BLU harus melakukan praktik bisnis yang sehat berupa pengelolaan kas yang transparan, sebagai dasar BLU dalam mengelola pendapatannya secara profesional. Pola pengelolaan keuangan BLU menitikberatkan pada fleksibilitas keuangan anggaran yang termasuk pada pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan aset, pengelolaan utang serta pengelolaan kas. Sikap profesional pengelola BLU dapat dilihat dari sikap pengelola BLU yang produktif serta efektif. (Wicaksono, 2015, p. 8). Atas dasar tersebut, museum BLU wajib melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi, melakukan pemungutan pendapatan, menyimpan dan mengelola kas di rekening bank umum, melaksanakan

pembayaran atas kewajiban BLU, mencari sumber daya penutup defisit jangka pendek, serta memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui investasi jangka pendek dengan resiko kecil (Ujiyanto & Isharyanto, 2016, p. 103).

## 2. Rancangan Museum Bawah Air M.V. Boelongan.

Museum Bawah Air M.V. Boelongan dibuat dengan rancang bangun sedemikian rupa agar dapat menjadi pelindung bagi keberadaan *shipwreck* M.V. Boelongan (gambar 4 dan 5). Museum ini juga menjadi area zonasi penyelaman, mengingat lokasi bangkai kapal yang menjadi daya tarik pariwisata selam. Dengan adanya museum bawah air ini, keberadaan *shipwreck* akan lebih terlindungi. Selain sebagai tempat yang atraktif dan edukatif, museum akan menjadi pelestari bagi *shipwreck* itu sendiri.

Bentuk bangunan museum adalah tanduk kerbau. Kerbau bagi masyarakat Minangkabau adalah hewan yang dianggap



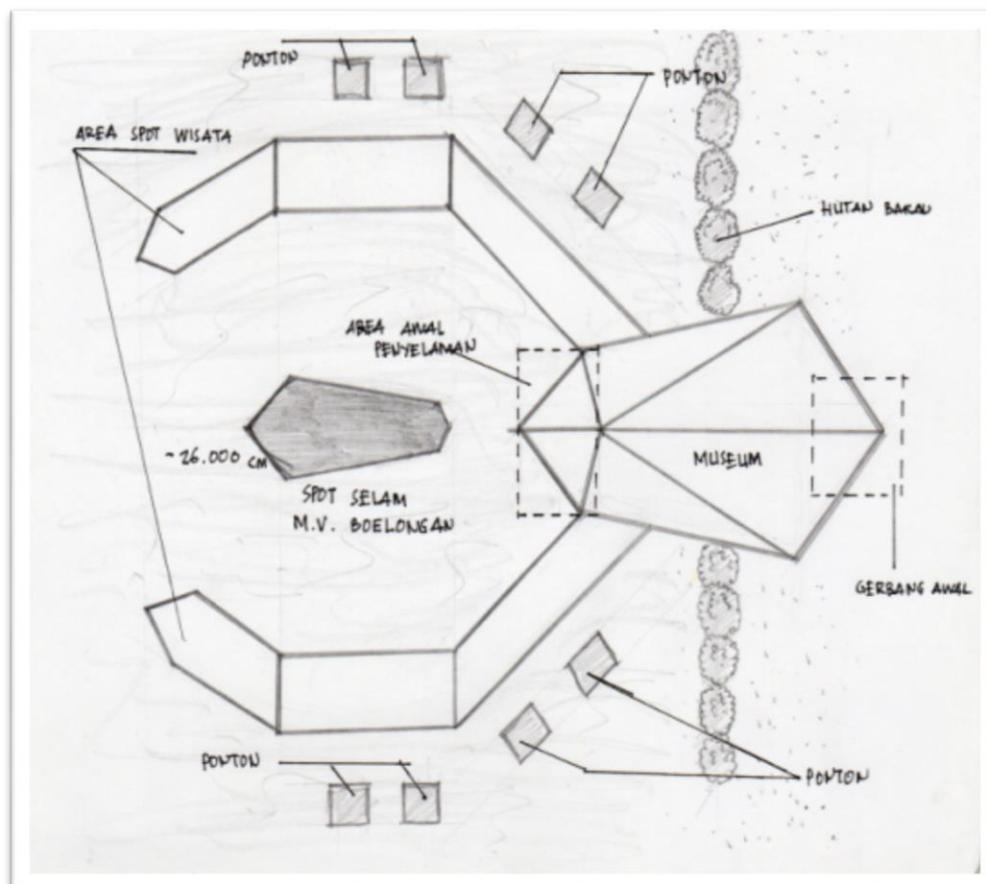
**Gambar 4.** Sketsa rancangan museum tampak depan tanpa skala (Sumber : Dwi Kurnia Sandy, 2018)

penting. Nama suku Minangkabau berasal dari kata *minang* yang artinya tanduk dan *kabau* yang artinya kerbau. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa pemberian nama ini terkait dengan kisah kemenangan masyarakat Minang saat melakukan adu kerbau melawan pendatang yang ingin menduduki wilayah mereka (Dewi, 2010, p. 42). Pemilihan tanduk kerbau sebagai bentuk museum sejalan dengan ide *appropriate museology* yang memperhatikan aspek-aspek setempat salah satunya melalui penggunaan arsitektur vernakular (Kreps, 2011, p. 26). Ruangannya pada bagian kepala kerbau juga dilengkapi dengan ukiran khas Minangkabau untuk menambahkan kesan etnis dan menunjukkan kekayaan khazanah budaya Minangkabau.

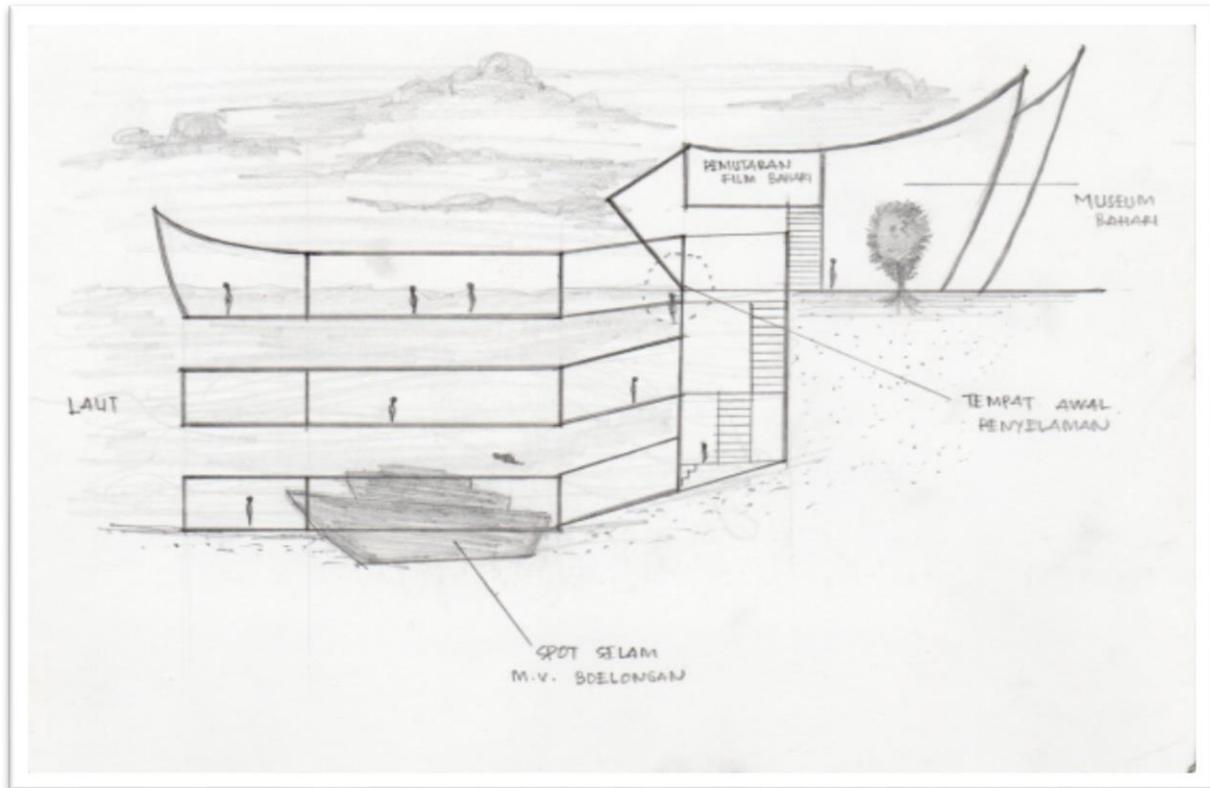
Salah satu aspek fundamental dari sebuah museum adalah pameran. Adanya

pameran di museum berkaitan dengan tujuan museum sebagai tempat mengedukasi. Pameran di museum bertujuan untuk menampilkan koleksi dan informasi yang edukatif (Anderson, 2004, pp. 1–2). Begitupun pada Museum Bawah Air M. V. Boelongan. Museum ini akan memiliki pameran tetap yang menampilkan informasi seputar M. V. Boelongan, informasi dan pengetahuan kemaritiman Indonesia dan dunia.

Agar sesuai dengan perkembangan zaman, pameran pada museum ini dirancang agar menarik dan bermanfaat bagi pengunjung. Museum masa depan adalah museum yang lebih emosional, dimana pengunjung dapat terhubung dengan berbagai cara salah satunya dengan



**Gambar 5.** Sketsa rancangan museum tampak atas tanpa skala (Sumber: Dwi Kurnia Sandy, 2018)



**Gambar 6.** Sketsa rancangan museum tampak samping tanpa skala (Sumber: Dwi Kurnia Sandy, 2018)

menggunakan teknologi digital (Sturabotti & Surace, 2017).

Agar sesuai dengan perkembangan zaman, pameran pada museum ini dirancang agar menarik dan bermanfaat bagi pengunjung. Museum masa depan adalah museum yang lebih emosional, dimana pengunjung dapat terhubung dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan teknologi digital (Sturabotti & Surace, 2017).

Museum Bawah Air M. V. Boelongan memiliki empat bagian. Bagian tersebut yaitu bagian (ruang) kepala kerbau, ruang tanduk kerbau tingkat 1, ruang tanduk kerbau tingkat 2, dan ruang tanduk kerbau tingkat 3. Masing-masing ruang akan memiliki pameran yang memiliki tema utama mengenai kemaritiman, khususnya tentang M. V. Boelongan itu sendiri. Adapun artefak-artefak yang akan ditampilkan dalam pameran adalah yang berhubungan dengan dunia perkapalan seperti alat navigasi,

jangkar, teropong, model mercusuar, meriam, mesin kapal, seragam awak kapal, sekoci, dan foto-foto yang berkaitan.

Pada bagian kepala kerbau terdapat titik awal penyelaman (*dive center*) bagi pengunjung yang berminat (gambar 6). *Dive center* berada di bagian ujung kepala kerbau sehingga penyelam hanya tinggal berjalan sedikit ke dermaga kecil di dekat bagian ini. Bagian tanduk kerbau I, II, dan III berbentuk lorong. Lorong-lorong tersebut berada pada setiap kedalaman delapan meter. Panjang setiap lorong adalah 30 meter. Antar lorong akan dihubungkan dengan eskalator dan tangga darurat. Berikut adalah pameran yang akan disajikan pada setiap bagian dalam Museum Bawah Air M. V. Boelongan (tabel 1):

#### a. Bagian Kepala Kerbau

Ruang ini adalah ruang perkenalan Museum M.V. Boelongan Nederland. Pameran yang ditampilkan adalah “Materi

Pembuka”, yaitu pameran yang dapat mengantarkan pengunjung mengetahui pembabakan sejarah kemaritiman di Indonesia yang dimulai dari zaman prasejarah, periode Hindu-Budha, periode Islam, periode kolonial, pasca kemerdekaan, hingga masa saat ini. Ruang ini dilengkapi dengan ruangan pemutaran film yang akan menampilkan introduksi museum serta film-film lain yang berkaitan dengan tema utama museum.

### b. Bagian Tanduk Kerbau I

Pada ruang ini ditampilkan pameran mengenai dunia perkapalan dunia dan Indonesia. Pameran akan menyajikan hal-hal terkait dengan teknologi pembuatan kapal, bahan pembuatan kapal, dan hal-hal teknis

lainnya. Terkait dengan teknologi, pada bagian ini akan ditampilkan berbagai peralatan pendukung sebuah kapal seperti jangkar, layar, dan teropong. Pengunjung dapat menyentuh langsung peralatan-peralatan ini untuk mempraktikkan cara penggunaannya.

### c. Bagian Tanduk Kerbau II

Pameran mengenai seluk-beluk M. V. Boelongan ditampilkan pada pameran di ruang ini. Mulai dari pembuatan kapal, rekam jejak penggunaan kapal, mulai dari masa kolonial Belanda, Perang Dunia II, hingga saat kapal ini berhasil ditaklukan oleh Jepang. Ruangan ini akan dilengkapi media interaktif yang memungkinkan pengunjung untuk merangkai perjalanan

**Tabel 1.** Pembagian Ruang dan Storyline Museum Bawah Air M.V. Boelongan

	<b>Bagian Kepala Kerbau</b>	<b>Bagian Tanduk I</b>	<b>Bagian Tanduk II</b>	<b>Bagian Tanduk III</b>
<b>Tema utama</b>	Pengenalan terhadap MV Boelongan	Sejarah Perkapalan di Indonesia dan dunia	Seluk-beluk M.V. Boelongan	Perenungan Perjalanan Kapal
<b>Storyline</b>	Materi Pembuka : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembabakan sejarah kemaritiman Indonesia</li> </ul>	Materi mengenai teknologi dan perkembangan kapal	Perjalanan M.V. Boelongan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan</li> <li>• Rekam jejak penggunaan kapal</li> <li>• Karamnya MV Boelongan</li> </ul>	M.V. Boelongan pasca Perang Dunia II
<b>Koleksi yang ditampilkan</b>	Foto, benda-benda yang terkait dengan perkembangan kemaritiman di Indonesia	Benda-benda yang berkaitan dengan teknologi perkapalan, diantaranya jangkar, layar, teropong, dsb	Foto-foto M.V. Boelongan terkini dan dahulu	Bangkai kapal M.V. Boelongan
<b>Lain-lain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan ruang pemutaran film</li> <li>• <i>Dive center</i> terdapat di bagian ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengunjung dapat menyentuh dan mencoba untuk menggunakan koleksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi media interaktif untuk merangkai cerita perjalanan kapal</li> <li>• Ruang didesain seperti ruang kargo kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditujukan agar pengunjung dapat menginterpretasi makna perjalanan sebuah kapal</li> </ul>

M.V. Boelongan. Bagian ini akan didesain sedemikian rupa seperti ruang kargo pada kapal agar pengunjung mendapatkan kesan yang jelas mengenai Kapal M. V. Boelongan.

#### **d. Bagian Tanduk Kerbau III**

Pada bagian ini pengunjung dapat melihat secara langsung bangkai Kapal M. V. Boelongan yang berada di dalam laut melalui kaca. Ruang ini adalah ruang bagi pengunjung untuk melakukan reinterpretasi ataupun perenungan mengenai perjalanan sebuah kapal. Sebelum mendatangi bagian ini pengunjung sudah terlebih dahulu mengunjungi bagian-bagian sebelumnya.

Dengan harapan para pengunjung dapat melakukan rekonstruksi sehingga mendapatkan pembelajaran dari museum ini. Melalui suasana pameran yang dapat membentuk kerangka pikir seperti yang ada dalam pikiran kurator, maka semakin tinggi kemungkinan makna di balik koleksi dapat dipahami oleh pengunjung atau penikmat pameran (Tanudirjo, 2009, p. 5). Dalam ruangan ini pengunjung akan difasilitasi untuk mengekspresikan kesan kunjungannya sehingga juga dapat menjadi umpan balik bagi museum

### **3. Aspek Pendukung Museum**

Tanpa kelengkapan fasilitas museum dan pengelolaan yang baik, museum hanya akan menjadi tempat penyimpanan koleksi seperti perpustakaan. Museum modern harus memperhatikan beberapa aspek pendukung, diantaranya pengunjung. Tanpa adanya pengunjung, museum tentu tidak dapat berjalan seperti tujuan pembentukannya. Namun perlu diingat museum tidak hanya selalu soal pelayanan kepada pengunjung, kontribusi pengunjung juga harus diperhatikan. Maka dari itu, Museum Bawah Air M. V. Boelongan akan membentuk organisasi yang menaungi pengunjung dalam perhimpunan anggota museum.

Perhimpunan ini merupakan sebuah wadah bagi para pecinta museum Bawah air M. V. Boelongan yang ingin memberikan kontribusi dan saran atas pelayanan museum. Perwakilan mereka akan diberikan posisi administrasi dalam pengelolaan museum. Kontribusi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat atas museum. Selain itu diharapkan anggota merasa memiliki peran atas setiap keputusan yang berhubungan dengan rencana strategis museum.

Para anggota tentunya harus memberikan dampak positif pada museum. Salah satunya dengan membayar iuran keanggotaan. Dengan membayar iuran keanggotaan, anggota perhimpunan museum akan mendapat berbagai manfaat. Itulah mengapa dengan sistem BLU, Museum Bawah Air M. V. Boelongan yang memiliki basis bisnis dapat memberikan manfaat bagi anggotanya seperti memberikan diskon kunjungan dan belanja atau kemudahan lainnya.

Aspek lain yang perlu dilihat adalah melibatkan komunitas. Saat ini masih banyak kelemahan dari pengelola museum dalam mengkomunikasikan isi museum. Komunitas dapat membantu hal tersebut dengan mengadakan kunjungan dan aktivitas lainnya. Selain itu komunitas ini juga dapat membantu museum untuk merangkul orang yang bukan anggota museum. Museum M. V. Boelongan dirancang untuk dapat memberikan ruang kepada para komunitas untuk melakukan kegiatan antara lain seperti, memberikan ruang panggung kesenian, akses perpustakaan dan berbagai pelatihan, salah satunya konservasi koleksi museum.

Aspek terakhir adalah masyarakat sekitar situs *Shipwreck* Boelongan. Museum bawah air M. V. Boelongan tidak boleh menutup mata terhadap masyarakat yang ada di sekitar situs dan museum. Secara tidak langsung situs tersebut adalah milik masyarakat. Sebagai sebuah solusi,



**Gambar 7.** Penampakan kawasan pengembangan wisata Kabupaten Pesisir Selatan (Sumber: Tim PKM PSH UGM Boelongan, 2016).

masyarakat sekitar museum harus dilibatkan agar dapat meningkatkan perekonomian sekaligus menjaga keberadaan situs. Museum dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam produksi souvenir museum. Hasil dari penjualan tersebut dibagi antara pengelola museum dan masyarakat yang berpartisipasi. Sebagai sebuah destinasi baru di kawasan pengembangan wisata Kabupaten Pesisir Selatan, keberadaan museum juga dapat menarik minat wisatawan ([gambar 7](#)).

Masyarakat sekitar juga harus menjaga lingkungan sekitar situs dan museum. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai yang dapat mengotori laut. Tidak melakukan penebangan pohon di sekitar Sungai Nyalo dan Sungai Mandeh. Mengurangi pemanfaatan hutan bakau. Penggunaan bom ikan juga harus diingatkan agar ekosistem laut di Situs *Shipwreck* Boelongan dapat terjaga. Menjaga Situs *Shipwreck* Boelongan sangat penting karena Situs *Shipwreck* Boelongan yang menjadi hal utama dalam pendirian museum ini.

## **PENUTUP**

Museum Bawah Air M.V. Boelongan di Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dirancang

sebagai museum modern yang mengikuti perkembangan paradigma museum. Tujuan penting dalam pendirian museum ini adalah untuk melindungi tinggalan berupa *Shipwreck* MV. Boelongan sehingga tetap terjaga kelestariannya. Selain itu tentu, museum ini memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai penting tinggalan ini kepada masyarakat. Bangunan museum mengadopsi gaya Minangkabau untuk menyisipkan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal setempat. Dalam pengelolaannya, museum akan menerapkan sistem Badan Layanan Umum (BLU) sehingga museum dapat menjadi museum mandiri yang lebih mudah dalam mengelola keuangan dan menghimpun masyarakat. Kedepannya, untuk mengaplikasikan konsep ini masih diperlukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut utamanya terkait arsitektur, aspek lingkungan, dan masyarakat.

## **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kami ucapkan kepada Tim PKM-PSH Boelongan 2016 yang telah memberikan dukungan dan kesediannya dalam membagikan data-data penelitian terkait M.V. Boelongan.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhityatama, S. (2012). *Pemodelan Jalur Aktivitas Penyelaman di Situs USAT Liberty, Tulamben, Bali: Studi Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi*. Universitas Gadjah Mada.
- Anderson, G. (2004). *Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift* (G. Anderson, Ed.). Lanham: Altamira Press.
- Dewi, G. (2010). *Arsitektur Vernakular Minangkabau (Kajian Arsitektur dan Eksistensi Rumah Gadang Dilihat dari Pengaruh serta Perubahan Nilai Budaya)*. Universitas Indonesia.
- Green, J. (2004). *Second Edition Maritime Archaeology a Technical Handbook Green*. Cambridge: Elsevier Academic Press.
- ICOM. (2007). *The ICOM Code of Ethics for Museum*. Paris.
- Kreps, C. (2011). Christina Kreps. *Museum Management and Curatorship*, 23(1), 23–41.
- Lewis, G. (2010). *Running a Museum: A Practical Handbook*. Paris: ICOM.
- Mensch, P. V. (1992). *Towards A Methodology of Museology*. University of Zagreb.
- Mensch, P. V., & Mensch, L. M. V. (2011). *New Trends in Museology*. Slovenia: Museum of Recent History Celje.
- Mustiko, H. W. (2012). *Pengaruh Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja SDM pada Museum Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik serta Museum Bahari)*. Universitas Indonesia.
- Prasetya, S. H. (2012). *Revitalisasi dan Pemanfaatan Benteng Vredenburg di Yogyakarta Tahun 1976-2011*. Universitas Sebelas Maret.
- Prasetya, S. H. (2018). *Pertimbangan Lingkungan dalam Perlindungan In-situ Kapal Karam MV. Boelongan Nederland di Teluk Mandeh, Sumatra Barat*. Universitas Gadjah Mada.
- Ridwan, N. N. H., Kusumah, G., Husrin, S., & Kepel, T. L. (2015). Kapal Karam MV. Boelongan di Kawasan Mandeh, Lingkungan Laut Sekitarnya, dan Kemungkinan Pengembangannya. In *Karakteristik Sumber daya Laut dan Pesisir* (pp. 84–133). Jakarta Utara: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Pesisir.
- Sandell, R. (1998). Museum as An Agent of Social Inclusion. *Museum Management and Curatorsh*, 17(4), 401–418.
- Satyawati, M. C. D. (2016). *Strategi Pengelolaan Museum Dirgantara Mandala sebagai Destinasi Wisata Pendidikan di Yogyakarta*. Istitut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Sturabotti, & Surace. (2017). Museum of the Future: Insights and Reflections from 10 International Museum. In *Museum Sector Alliance Project*. European Union.
- Tanudirjo, D. A. (1989). *Ragam Metoda Penelitian Arkeologi dalam Skripsi Mahasiswa Arkeologi UGM*. Yogyakarta.
- Tanudirjo, D. A. (2007). Museum sebagai Mitra Pendidik. *Museografia*, 1(1), 15–29.
- Tanudirjo, D. A. (2009). Interpretasi Pameran. *Kegiatan Peningkatan Kemampuan Dan Ketrampilan Tenaga Museum Tingkat Lanjut*. Semarang.

- Ujianto, D. A., & Isharyanto, F. (2016). Pengelolaan Museum Pemerintahan dengan Model Layanan Umum (Suatu Tinjauan). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 89–90.
- UNESCO. (2001). *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*. Paris: Official Text.
- Wahyudi, W. R., & Kuswanto. (2014). Kajian Konsep Open-Air Museum: Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Trowulan. *Berkala Arkeologi*, 34(1), 65–84.
- Wibowo, A. J. I. (2015). Persepsi Kualitas Layanan Museum di Indonesia: Sebuah Studi Observasi. *Manajemen*, 15(1), 13–40.
- Wicaksono, H. B. (2015). *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Universitas Terbuka)*. Universitas Indonesia.
- Winaya, A. (2015). Peran Museum Majapahit sebagai Mediator Pelestarian Warisan Budaya dan Industri Pembuatan Bata. *Amerta*, 33(2), 77–100.
- Yulianti, D. (2011). *Museum Olahraga Nasional sebagai Museum Pasca Modern*. Universitas Indonesia.

**Lampiran 1.** Referensi Acuan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 Tentang Permuseuman Permuseuman. 19 Agustus 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 159. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 48. Jakarta.

UNESCO, 2001. *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*. Official Text, Paris.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 24 November 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 130. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 Tentang Permuseuman Permuseuman. 19 Agustus 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 159. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 48. Jakarta.

Surat Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. KEP.56/DJ-PSDKP/2011.